

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT
LABUHAN DELI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi*



Nama	: MITA NUR AULIA
NPM	2005170085
Program Studi	: AKUNTANSI
Konsentrasi	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MITA NUR AULIA
NPM : 2005170085
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT LABUHAN DELI

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

M. Firza Alpi, S.E., M.Si.

Penguji II

Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak.

Pembimbing

Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MITA NUR AULIA

N.P.M : 2005170085

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT
LABUHAN DELI**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.**

Medan, Agustus 2025

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HARAHAH, S.E., S.S., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

(M. SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc.)

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



Dr. H. JANURI, S.E, M.M, M.Si, CMA)



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Mita Nur Aulia
NPM : 2005170085
Dosen Pembimbing : Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian	6/8/2025	Sh
Bab 2	perbaiki bab 2, tambahkan teori dan jurnal, penelitian terdahulu, kerangka konseptual	6/8/2025	Sh
Bab 3	perbaiki definisi operasional, teknik analisis data, jenis dan sumber data	12/8/2025	Sh
Bab 4	perbaiki analisis data dan pembahasan, cek data	12/8/2025	Sh
Bab 5	perbaiki kesimpulan dan Saran.	20/8/2025	Sh
Daftar Pustaka	perbaiki data penelitian, cek kembali	20/8/2025	Sh
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, siap sidang	25/8/2025	Sh

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



(M. SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc.)

Medan, Agustus 2025
Dosen Pembimbing



(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., S.S., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : MITA NUR AULIA

N.P.M : 2005170085

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT LABUHAN DELI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



MITA NUR AULIA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT LABUHAN DELI

MITA NUR AULIA

email: mitanuraulia2001@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Labuhan Deli, serta menilai kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana SAP berbasis akrual menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data dianalisis dengan mengacu pada indikator penerapan SAKP dan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Camat Labuhan Deli telah menerapkan SAKP sesuai dengan SAP berbasis akrual, yang meliputi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penerapan sistem ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi dan aplikasi yang sering terjadi, serta gangguan teknis pada sistem. Secara keseluruhan, laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli telah memenuhi ketentuan SAP dan PP No. 71 Tahun 2010, namun diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi sistem informasi keuangan untuk mendukung kinerja pelaporan keuangan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas.

ABSTRACT

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT LABUHAN DELI

MITA NUR AULIA

email: mitanuraulia2001@gmail.com

This study aims to analyze the implementation of the Government Accounting System (SAKP) in improving the quality of financial statements at the Labuhan Deli Subdistrict Office, as well as to assess its compliance with the Government Accounting Standards (SAP) stipulated in Government Regulation No. 71 of 2010. The background of this research is based on the importance of transparency and accountability in regional financial management, where accrual-based SAP serves as the main guideline in preparing government financial statements. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, documentation, and literature studies. The data were analyzed based on the indicators of SAKP implementation and the qualitative characteristics of government financial statements, namely relevance, reliability, comparability, and understandability.

The results indicate that the Labuhan Deli Subdistrict Office has implemented SAKP in accordance with the accrual-based SAP, including the preparation of the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement, and Notes to the Financial Statements. The implementation of this system has contributed positively to improving the quality of financial statements, although challenges remain, such as limited human resources, frequent changes in regulations and reporting applications, as well as technical disruptions in the system. Overall, the financial statements of the Labuhan Deli Subdistrict Office comply with SAP and Government Regulation No. 71 of 2010; however, further improvement in human resource capacity and optimization of the financial information system are needed to enhance the effectiveness of financial reporting.

Keywords: Government Accounting System, Government Accounting Standards, Financial Statement Quality, Transparency, Accountability.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli". Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Bapak M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
6. Ibu Nabila Dwi Aginta, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Prodi Akuntansi.

7. Ibu Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan, dan masukkan kepada penulis dalam penyusunan proposal ini.
8. Ibu Nela Mafuzah Nst, S.Sos., M.AP. Selaku Camat Kantor Labuhan Deli, dan Ibu Lika Ismaysiktah, S.IP., M.AP. Selaku Kepala Subbag Keuangan dan Program Kantor Camat Labuhan Deli
9. Seluruh staf pegawai yang telah banyak membantu dan menyumbangkan pengetahuan serta memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat dari awal penulis kuliah hingga sekarang ini.
10. Untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Hamzah, S.Sos dan Mama tercinta Endang Anita, S.Pd. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Terimakasih udah selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat , tenaga dan fikirian. Terimakasih banyak atas motivasi, memberikan dukungan dan doa hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
11. Untuk kedua abang saya, T.Mhd.Irfandi, S.STP dan Briptu T. Rian Hamdani, S.H. Penulis mengucapkan terimakasih udah selalu menjaga penulis dan selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus menjadi adik perempuan yang kuat.

12. Teruntuk kedua ipar saya Puja Pangestu, S.Pd dan Lika Ismaysiktah, S.IP., M.AP penulis mengucapkan terimakasih banyak karena udah selalu mendengar keluh kesah penulis disaat masa-masa pengerjaan skripsi. Terimakasih udah menganggap penulis lebih dari adik ipar. Makasih banyak atas semua dukungan untuk penulis.
13. Teruntuk teman saya yang sangat saya sayangi fatiah Sevtiani, S.E terimakasih telah menemani penulis dimasa-masa sulit dan penuh perjuangan ini. Terimakasih udah mau berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi ini demi gelar sarjana. Terimakasih atas dukungannya untuk menemani penulis.
14. Terakhir tidak lupa, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Mita Nur Aulia. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih kepada jiwa yang kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi proses kehidupan. Semoga langkah kebaikan terus menyertai dan semoga Allah selalu meridhoi setiap proses dan selalu melindungi penulis. Aamiin.

Kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis tiada imbalan yang layak disampaikan, hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Allah SWT dan semoga amal kebaikan dibalas dengan lebih baik. Aamiin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Juli 2025

MITA NUR AULIA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
14.1	L
atar Belakang Masalah	1
14.2	I
identifikasi Masalah	8
14.3	R
umusan Masalah	8
14.4	T
ujuan Penelitian	9
14.5	M
manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Uraian Teoritis.....	11
2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintah	11
2.1.1.1 Sistem.....	11
2.1.1.2 Akuntansi.....	11
2.1.1.3 Sistem Akuntansi.....	11
2.1.1.4 Pemerintah.....	13
2.1.1.5 Akuntansi Pemerintah	14
2.1.1.6 Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah.....	15
2.1.1.7 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	16
2.1.1.7 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.1.1.8 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Definisi Operasional.....	27

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Sumber dan Jenis Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Metode Analisis Data	31
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum	34
4.1.1 Sejarah Labuhan Deli	34
4.1.2 Letak Geografis	36
4.1.3 Struktur Organisasi.....	38
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Labuhan Deli.....	47
4.2.2 Hasil Interview	61
4.3 Pembahasan	75
4.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Labuhan Deli.....	75
4.3.2 Laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010?.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Labuhan Deli.....	5
Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Labuhan Deli.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	29
Tabel 3. 3 Keterkaitan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	32
Tabel 4. 1 Neraca per 31 Desember 2024	47
Tabel 4. 2 Laporan Operasional Tahun 2024	50
Tabel 4. 3 Laporan Arus Kas Tahun 2024	53
Tabel 4. 4 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4. 1 Labuhan Deli Tahun 1890-an.....	35
Gambar 4. 2 Sketsa Peta Kecamatan Labuhan Deli	37
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Kecamatan Labuhan Deli	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan reformasi di Indonesia telah membawa pembaruan dalam tata kelola keuangan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan sistematis pengelolaan keuangan ini terus terjadi seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi hal yang patut mendapat perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa adalah pengelolaan keuangan yang tepat. Meski demikian, berbagai kendala dalam mengelola keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali menjadi tantangan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah perlu memiliki kemampuan yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai salah satu alat utama untuk menyampaikan informasi keuangan, laporan ini digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk menilai kinerja dan tanggung jawab entitas pemerintah. Dalam konteks ini, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan memenuhi standar yang berlaku.

SAP, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dirancang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan laporan keuangan dapat dihasilkan secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan publik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah (Peraturan Perundang-undangan, 2010).

Sistem akuntansi yang digunakan pada Kantor Camat Labuhan Deli saat ini mengacu pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Deli Serdang. Aplikasi ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara elektronik di lingkungan pemerintahan daerah. Di sisi lain, terdapat pula aplikasi SIPD RI yang merupakan sistem informasi keuangan daerah terpusat yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ditujukan sebagai standar nasional dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pencatatan keuangan di wilayah Deli Serdang lebih banyak dilakukan melalui aplikasi SIPD Deli Serdang. Akibatnya, data yang telah diinput melalui SIPD Deli Serdang perlu dimasukkan kembali secara manual ke dalam aplikasi SIPD RI untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat. Proses input ulang ini tidak hanya menambah beban kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian (ketidaksinkronan) antara laporan keuangan yang tercatat di SIPD Deli Serdang dengan yang ada di SIPD RI. Permasalahan tersebut diperparah dengan kondisi aplikasi SIPD RI yang sering mengalami galat atau gangguan sistem, sehingga

proses penginputan data menjadi terhambat dan berdampak terhadap ketepatan waktu serta akurasi penyusunan laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan pada Kantor Camat Labuhan Deli telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menggunakan basis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tentang meliputi LRA, NERACA, LO, LPE, CaLK.

Basis yang digunakan dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Labuhan Deli adalah basis kas menuju akrual, yaitu dimana untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas dan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual.

SAP dengan baerbasi akrual diterapkan untuk bertujuan meningkatkan kemanfaatan pada laporan keuangan di Kantor Camat Labuhan Deli bagi pengguna kepentingan pada entitas intansi pemerintah ketika menilai akuntabilitas dan juga transparansi serta keputusan pada suatu instansi pemeritah daerah (Safitri et al., 2017)

Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan isu penting yang masih sering diabaikan dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah. Berbagai permasalahan terkait rendahnya mutu laporan keuangan masih kerap terjadi di sejumlah instansi pemerintahan di Indonesia. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akuntan pemerintah terhadap standar akuntansi pemerintahan, lemahnya penguasaan atas kode etik akuntan publik, serta pengendalian internal yang tidak optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah.

Salah satu langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan serta memenuhi kebutuhan publik berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk mendukung perubahan positif dalam pengelolaan keuangan, diterapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber dana secara mandiri serta menentukan alokasi anggaran, dengan tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Seiring perkembangan zaman, pemerintah terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mencakup ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penerimaan, pengeluaran, hingga pengelolaan aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Indonesia, 2019).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. SAP dirancang untuk memberikan jaminan keandalan dalam pelaporan keuangan, sehingga menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun laporan yang

berkualitas. Kepatuhan terhadap SAP menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sandart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memberi gambaran atas posisi keuangan pemerintah dan menyajikan informasi yang sebenarnya tentang hak dan kewajiban pemerintah. SAP dengan basis akrual adalah standart didalam akuntansi yang membenarkan adanya pendapatan, beban, asset, utang, serta ekuitas yang menyajikan laporan finansial berbasis akrual(Sudaryati & Permana, 2020).

Dalam rangka mendukung penerapan SAP, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan pedoman berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan daerah (Negeri, 2010).

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Labuhan Deli 2022 dan 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022					
Urusan Pemerintahan : 7-01 KECAMATAN SKPD : 7-01.2-11.2-13.02 KECAMATAN LABUHAN DELI Unit Organisasi : 7-01.2-11.2-13.02.000 KECAMATAN LABUHAN DELI Sub Unit Organisasi : 7-01.2-11.2-13.02.000.000 KECAMATAN LABUHAN DELI					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	199.377.183,00	136.780.000,00	68,10	131.089.020,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.377.183,00	136.780.000,00	68,10	131.089.020,00
4.1.02	Retribusi Daerah	199.377.183,00	136.780.000,00	68,10	131.089.020,00
5	BELANJA DAERAH	4.528.356.549,00	3.975.986.202,00	87,84	4.028.900.670,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.528.356.549,00	3.975.986.202,00	87,84	4.028.900.670,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.241.109.735,00	2.704.651.451,00	83,45	2.660.979.696,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.246.814,00	1.271.134.751,00	98,90	1.367.920.984,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0	8.547.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0	8.547.000,00
SURPLUS / DEFISIT		(4.326.979.366,00)	(3.640.206.202,00)	0	(3.906.358.650,00)
SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN		(4.326.979.366,00)	(3.640.206.202,00)	0	(3.906.358.650,00)

Berdasarkan Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 total pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp199.377.183,00 dengan realisasi sebesar Rp135.780.000,00 atau 68,10%, seluruhnya berasal dari retribusi daerah. Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp4.526.356.549,00 dan terealisasi sebesar Rp3.975.986.202,00 atau 87,84%. Belanja terbesar adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp2.704.851.451,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.271.134.751,00. Tidak terdapat belanja modal pada tahun 2023. Akibatnya, terjadi defisit anggaran sebesar Rp3.840.206.202,00. Realisasi tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun 2022 menunjukkan tren penurunan defisit, dari Rp3.906.358.650,00 menjadi Rp3.840.206.202,00.

Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Labuhan Deli 2023 dan 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023					
Organisasi		7-01.2-11.2-13.02	Kecamatan Labuhan Deli		
Sub Unit Organisasi		7-01.2-11.2-13.02.01	KECAMATAN LABUHAN DELI		
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	199.377.183,00	163.970.000,00	82,24	135.780.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.377.183,00	163.970.000,00	82,24	135.780.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	199.377.183,00	163.970.000,00	82,24	135.780.000,00
5	BELANJA DAERAH	4.895.296.760,00	4.325.172.386,00	88,35	3.975.986.202,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.893.296.760,00	4.323.172.386,00	88,35	3.975.986.202,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.524.576.860,00	2.971.704.201,00	84,31	2.704.851.451,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.368.719.900,00	1.351.468.185,00	98,74	1.271.134.751,00
5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(4.695.919.577,00)	(4.161.202.386,00)	100,00	(3.840.206.202,00)



Berdasarkan Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Labuhan Deli tahun 2024 menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp199.377.183,00 dengan realisasi Rp163.970.000,00 atau 82,24%, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp135.780.000,00. Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp4.895.296.760,00 dan terealisasi sebesar Rp4.325.172.386,00 atau 88,35%, juga meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.975.986.202,00. Komponen terbesar belanja masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp2.971.704.201,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.351.468.185,00. Pada tahun 2024, terdapat pula belanja modal sebesar Rp2.000.000,00 yang tidak ada pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp4.161.202.386,00, sedikit lebih besar dari defisit tahun 2023 yang mencapai Rp3.840.206.202,00.

Tingginya tingkat realisasi belanja dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. Efektivitas dalam pelaksanaan belanja daerah ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem akuntansi keuangan pemerintah. Melalui sistem yang baik, pengendalian dan pelaporan anggaran dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan telah diterapkan. Ketika laporan keuangan disusun dengan baik dan sesuai dengan SAP, hal ini

tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan mengenai kredibilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai masalah tersebut, maka dari itu penulis melakukan suatu riset dengan berjudul ***“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) belum optimal dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Perubahan sistem aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi menyulitkan bendahara untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang berlangsung cukup sering dan dalam waktu singkat.
3. Perubahan regulasi, seperti adanya pemotongan dalam suatu kebijakan, kerap kali hanya diumumkan melalui situs web Pemerintah Kabupaten tanpa disertai pemberitahuan langsung kepada pihak Kantor Camat.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Labuhan Deli?
2. Apakah laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Labuhan Deli
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2010

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP) di tingkat pemerintahan daerah, khususnya pada tingkat kecamatan.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, terutama terkait peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Camat Labuhan Deli

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan SAKP dan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di seluruh unit kerja, termasuk di tingkat kecamatan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan SAP, terutama dalam aspek pengawasan, pelatihan sumber daya manusia, dan pengelolaan teknologi informasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintah

2.1.1.1 Sistem

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan perincian, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan, unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi (Mulyadi, 2023).

2.1.1.2 Akuntansi

Akuntansi menurut (Weygandt et al., 2015) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat perhitungan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

2.1.1.3 Sistem Akuntansi

Setiap organisasi memerlukan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajerial dan pengambilan keputusan ekonomi, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Pada prinsipnya sistem pasti terdiri dari struktur

dan proses. Struktur merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem tersebut (Mulyadi, 2023).

Akuntansi adalah suatu sistem. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, yang disebut sebagai subsistem (Mulyadi, 2023). Sub-sub sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Input suatu sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, outputnya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan.

Menurut (Mulyadi, 2013) sistem akuntansi adalah Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan serta seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Didalam buku (Halim, 2022) dasar sistem akuntansi terbagi 4 yaitu :

1. Basis Kas (*cash basis*).

Basis kas, menetapkan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas atau juga berakibat pada kas, apabila suatu transaksi tidak menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrual (*accrual basis*).

Basis akrual ialah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat didalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadi.

3. Basis kas Moditifikasi (*modified cash basis*).

Basis kas moditifikasi ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan juga melakukan penyesuain pada tahun anggaran berdasar basis akrual.

4. Basis Akrual Modifikasi (*modified accrual basis*).

Basis akrual moditifikasi ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi tertentu dan juga menggunakan basis akrual untuk sebagian transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Sistem akuntansi ini berhubungan dengan waktu pengukuran dilaksanakan pada umumnya, biasanya dipilih menjadi sitem akuntansi berbasis kas dan akrual.

2.1.1.4 Pemerintah

Menurut (Napitupulu, 2017) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Pemerintahan menurut (Strong, 2024) yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

2.1.1.5 Akuntansi Pemerintah

(Halim, 2014) mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai kegiatan jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah.

Akuntansi Keuangan pemerintah adalah akuntansi yang dipakai oleh Pemerintahan, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah.

Akuntansi keuangan pemerintah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. UUD Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara.
2. UU dibidang keuangan Negara.
3. UU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD).
4. Peraturan perundang-undang yang mengatur pemerintah negara, khususnya yang mengatur keuangan Negara.
5. Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pertimbangan keuangan pemerintah dan daerah.
6. Ketentuan perundang-undang tetntang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah atau daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pasal 1 yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kemudian disebutkan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.1.1.6 Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah

Akuntansi keuangan daerah yaitu sebuah tahapan perlakuan identifikasi pencatatan, ukuran, serta laporan kegiatan bisnis keuangan perekonomian menurut suatu instansi pemerintahan setempat yang disusun menjadi suatu bentuk data

sebagai bentuk mengambil kebijakan dari berbagai pihak eksternal pemerintahan yang membutuhkan (Susanti, 2020).

2.1.1.7 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

A. Sistem Pencatatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ayat 3 menjelaskan bahwasanya secara dasar kegiatan bisnis perekonomian yaitu rangkain kegiatan yang berkaitan pada uang. Pembuatan ukuran terhadap kegiatan perekonomian menerapkan satuan uang, sehingga segala kegiatan bisnis akuntansi seharusnya dikatakan dengan satuan tersebut.

Terdapat tiga macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan single entry sering juga disebut dengan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas dan akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan akuntansi yang menggabungkan double entry dengan pencatatan pada buku anggaran. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem *double entry*.

B. Dasar Pengakuan Akuntansi

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan terdapat tiga dasar atau basis akuntansi keuangan pemerintahan daerah yaitu:

1. Basis Kas Ketika kas ataupun setara kas diperoleh ataupun dibayarkan, berbasis akuntansi yang dikenal sebagai basis kas memperhitungkan dampak tersebut.
2. Basis Kas Menuju Akrual Basis akuntansi yang dikenal sebagai "cash-to-accrual" mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berbasis kas sementara secara akrual mengakui aset, utang, dan dana ekuitas.
3. Basis Akrual Terlepas dari kas atau setara kas diperoleh ataupun dibayarkan, dasar akuntansi akrual mengakui hubungan antara transaksi dan peristiwa lain segera setelah terjadi.

2.1.1.7 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP, 2016) Laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dihasilkan unit akuntansi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggaranya dalam

satu periode. Beberapa unsur yang ada di dalam laporan realisasi anggaran yaitu:

- a. LRA-Penerimaan, atau pendapatan dari bendahara umum negara, bendahara umum daerah, atau badan pemerintahan lain yang akan menambahkan jumlah kas anggaran pertahun berjalan dan yang dimiliki pemerintahan serta tidak wajib dibayarkan lagi.
- b. Pengeluaran, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara atau daerah yang dapat menguras dana pemerintah dalam tahun anggaran berjalan dan yang tidak dapat dikembalikan kepada pemerintah.
- c. Perpindahan yang meliputi dana perimbangan dan dana bagi hasil adalah penerimaan pendapatan atau pembayaran uang oleh satu entitas pelapor ke bisnis pelapor lainnya.
- d. Pembiayaan yaitu masing-masing penghasilan ataupun pengeluaran yang tidak mengurangi nilai bersih suatu entitas dan yang harus dibayar kembali atau yang tidak akan didapatkan ulang, baik di tahun anggaran masa sekarang ataupun masa-masa yang akan datang.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Beberapa unsur yang termuat dalam neraca yaitu sebagai berikut:

- a. Aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah meliputi sumber daya non keuangan yang pelayanannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta sumber daya peninggalan sejarah dan budaya. Sumber daya ini digunakan dari pemerintahan atau publik dan bisa dilakukan pengukuran dengan satuan uang. Yaitu kekayaan di waktu lalu dengan kegunaan perekonomian serta sosial yang diharapkan di waktu mendatang.
- b. Kewajiban adalah hutang yang berasal melalui kejadian sebelumnya dan pelunasannya menguras sumber keuangan pemerintahan.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintahan yang ditentukan dengan cara mengurangi kewajibannya dari kekayaannya.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan yang menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Komponen laporan operasional adalah dengan berikut:

- a. Pendapatan laporan operasional
- b. Beban
- c. Transfer
- d. Pos luar biasa

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu priode.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu kas yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Unsur-unsur yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Menampilkan data secara umumnya mengenai materi laporan dan akuntansi.
- b. Menampilkan data mengenai peraturan fiscal dan perekonomian makro.
- c. Menampilkan pengikhtisaran perolehan tujuan atau sasaran finansial saat tahun laporan serta penjelasan perihal kendala yang dialami.
- d. Menampilkan data mengenai landasan susunan pelaporan finansial juga peraturan akuntansi yang digunakan terhadap kegiatan penting lain.
- e. Menampilkan informasi lengkap setiap pos terhadap lembaran awal pelaporan finansial.
- f. Menampilkan data yang diwajibkan dari PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang tidak dijelaskan pada lembaran awal laporannya.

- g. Menampilkan data lain yang dibutuhkan dalam tampilan secara baik, yang tidak tersajikan pada lembaran awal laporannya.(Djanegara et al., 2017)

2.1.1.8 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas pada laporan keuangan Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan tersebut merupakan suatu ukuran yang bersifat normatif yang harus diciptakan pada informasi akuntansi sehingga instansi pemerintahan bisa mencapai sasarannya. Ada terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah yang mencakup:

a. Relevan

Jika informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna menganalisis fenomena di waktu sebelumnya maupun terkini, mengantisipasi masa depan, dan memvalidasi serta mengevaluasi hasil evaluasi mereka di masa lalu, maka pengetahuan tersebut dapat berdampak pada kebijakan pengguna. Akibatnya, informasi dalam laporan keuangan yang relevan bergantung pada bagaimana informasi itu akan digunakan. Informasi dianggap relevan jika:

1) Mempunyai manfaat umpan balik (feedback value)

Pengguna harus dapat mengkonfirmasi atau menilai peristiwa sejarah menggunakan informasi tersebut.

2) Mempunyai manfaat prediktif

Berdasarkan kinerja historis dan keadaan saat ini, informasi dalam laporan keuangan bisa memudahkan pengguna untuk membuat prediksi tentang masa depan.

3) Tepat waktu

Informasi laporan keuangan disampaikan dengan segera hingga bisa berdampak dan membantu untuk mengambil keputusan.

4) Lengkap

Semua data akuntansi bisa memberi pengaruh mengambil keputusan yang berfokus terhadap isu-isu terkini harus disertakan dalam penyajian informasi akuntansi keuangan pemerintah. Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan informasi akuntansi, maka informasi tersebut harus disajikan dengan jelas.

b. Andal

Informasi laporan keuangan harus dapat diverifikasi, bebas dari salah tafsir dan ketidakakuratan besar, dan memberikan semua fakta insiden yang relevan secara jujur. Jika penyajian laporan keuangan tidak dapat diandalkan maka dapat dipastikan laporan keuangan tersebut keliru. Informasi dapat dikatakan andal jika memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur

Kegiatan bisnis atau fenomena lain yang dimaksudkan untuk tersajikan oleh informasi ataupun dengan normal diantisipasi harus dijelaskan secara akurat.

b. Dapat diverifikasi

Informasi laporan keuangan harus dapat diverifikasi, dan jika uji diulangi oleh pihak yang berbeda lebih dari satu kali, temuan tidak boleh berbeda secara signifikan.

c. Netralitas

Informasi tidak dapat diberikan untuk memajukan kepentingan pihak tertentu; itu harus disajikan untuk kepentingan umum.

c. Dapat Dibandingkan

Jika informasi pelaporan bisa diperbandingkan pada laporan dari periode lalu ataupun organisasi pelaporan lainnya secara umum, informasi tersebut akan jauh lebih relevan. Hanya jika suatu entitas menggunakan prinsip akuntansi yang konsisten di seluruh periode pelaporan, perbandingan internal bisa dilaksanakan. Apabila instansi yang dibandingkan menerapkan peraturan akuntansi yang serupa, yang dibandingkan pada eksternal bisa dilaksanakan. Perubahan dapat diberitahukan pada periode terjadinya jika badan pemerintah mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih unggul dari prinsip akuntansi saat ini.

d. Dapat Dipahami

Pemakai harus bisa mengerti informasi yang ditawarkan pada pelaporan finansial, serta informasi tersebut harus dinyatakan dengan cara dan berbahasa yang sesuai pada tingkatan pengetahuannya. Maka dari itu, pemakai dianggap mempunyai kesadaran relevan terhadap operasional dan lembaga pelapor serta kemauan untuk memahami informasi yang relevan. (Masnila et al., 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Ningsih, 2013)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Metode analisis deskriptif	Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2	(Ma'ruf, 2020)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir	Metode analisis deskriptif	Kantor Camat Sungai Batang di dalam membuat laporan pertanggungjawaban, belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013.
3	(Ritonga, 2023)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)	Metode analisis deskriptif	Hasil temuan menampilkan penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintahan memiliki potensi untuk menambah tingkat kualitas laporan keuangan pemerintahan Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian juga ditemukan bahwa penerapan sistem

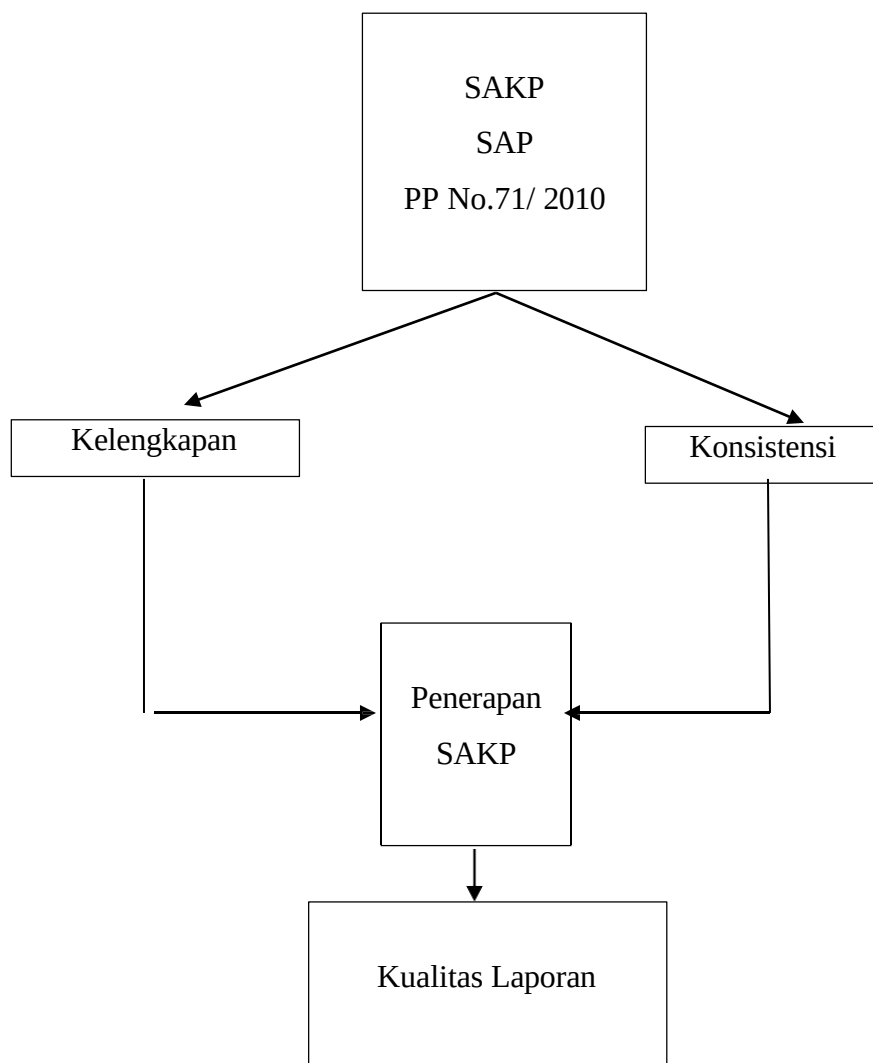
				akuntansi keuangan pemerintah daerah sudah cukup baik pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
4	(Zoraya et al., 2024)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Mamajang	Metode analisis deskriptif	Kantor Kecamatan Mamajang Kota Makassar hanya menyajikan lima komponen dalam melaporkan anggaran dalam bentuk buku yang didalamnya mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2022 dari seharusnya 7 laporan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka konsep penelitian adalah abstraksi atau gambaran dari suatu kenyataan sehingga dapat dikomunikasikan dan terbentuk suatu teori yang mendeskripsikan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang tampilan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk peningkatan mutu pelaporan finansial. Pemerintahan setempat di masa sekarang diharuskan untuk dapat menyajikan pelaporan yang bermutu dan mempunyai nilai keterbukaan maupun akuntabilitas besar dari menggunakan sistem yang sudah ditentukan. Tahapan pembuatan susunan laporan keuangan yang dilaksanakan wajib berdasarkan pada kebijakan pemerintahan nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari hadirnya aturan

pemerintah itu diinginkan pelaporan pada sebuah tempat pemerintahan mempunyai pelaporan yang bermutu, diikuti dari hasil belajar para tenaga kerja yang ada di pemerintahan setempat guna mampu mengerti serta menjalankan sistem yang berlaku untuk mengelola keuangan daerah dan dapat bertanggungjawab terhadap daerah tersebut.

Sedangkan untuk kualitas laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek yang relevan dalam pemecahan masalah secara terperinci dan akurat melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, serta penyusunan data yang kemudian dikaji berdasarkan teori yang mendukung. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait tulisan, ucapan, atau bentuk dokumentasi lain yang dianalisis berdasarkan individu, kelompok, komunitas, atau suatu institusi dalam konteks tertentu. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif secara holistik.

3.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian kualitatif ini, variabel dijabarkan dalam bentuk konsep dan fokus kajian untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator Operasional
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP)	Penerapan SAP adalah proses penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	- Pemahaman pegawai terhadap konsep SAP berbasis akrual - Pelaksanaan proses pencatatan transaksi

	Nomor 71 Tahun 2010 untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah daerah secara sistematis dan akuntabel.	sesuai standar SAP - Ketersediaan dan pemanfaatan perangkat serta aplikasi akuntansi - Kepatuhan terhadap regulasi seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 - Dokumentasi prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan
Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah tingkat kemampuan laporan dalam memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.	- Kesesuaian laporan dengan prinsip akuntansi pemerintahan - Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan - Keterbukaan informasi dan kemudahan pemahaman isi laporan - Keandalan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan - Bukti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran
Faktor Penghambat	Faktor penghambat adalah segala bentuk kendala internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas penerapan SAP dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.	- Kurangnya pemahaman atau kompetensi SDM - Keterbatasan sarana dan prasarana (sistem/aplikasi) - Hambatan koordinasi antar bagian atau instansi - Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan - Kurangnya pelatihan atau pembinaan berkelanjutan

Sumber: Penulis, 2025

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Februari hingga Mei 2025. Pemilihan lokasi

penelitian ini didasarkan pada relevansi permasalahan yang akan diteliti, yang secara khusus terjadi di Kantor Camat Labuhan Deli. Selain itu, lokasi penelitian yang berdekatan dengan domisili peneliti juga menjadi pertimbangan, karena memberikan kemudahan akses dalam proses pengumpulan data dan analisis terkait permasalahan yang akan dikaji.

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		April 2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				September 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Riset awal																				
3	Pembuatan proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Riset																				
7	Penyusunan Skripsi																				
8	Bimbingan Sekripsi																				
9	Sidang Meja Hijau																				

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan peneliti secara langsung.
2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah, misalnya di perpustakaan, jurnal-jurnal ekonomi,

perusahaan-perusahaan, buku-buku ilmiah, literatur, dan *website* berkaitan dengan judul dalam penelitian ini ini sehingga diperoleh data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara berbincang langsung dengan narasumber yang relevan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bendahara Kantor Camat Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, untuk memperoleh data mengenai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Labuhan Deli.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Ibu Nela Mafuzah Naustion, S.Sos., M.AP., Camat Labuhan Deli.
- b. Lika Ismaysiktah, S.IP., Kepala Sub Bagian Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli.
- c. Dedi Lumbarja, A.Md. Bendahara Kantor Camat Labuhan Deli.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data sekunder berupa berbagai dokumen, laporan pertanggungjawaban, atau berkas institusi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari metode ini menjadi tambahan untuk melengkapi informasi yang tidak bisa diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian terkait penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Kantor Camat Labuhan Deli mencakup:

- a. Informasi mengenai profil Kantor Camat Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, yang meliputi visi dan misi, struktur organisasi, serta gambaran umum penerapan sistem akuntansi di instansi tersebut.
- b. Data laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Camat Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, termasuk implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dan terperinci, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan ini melibatkan pengelompokan data, penyusunan, serta pemilihan data yang relevan untuk dianalisis, dengan mengabaikan informasi yang tidak signifikan. Hasil analisis kemudian disusun menjadi kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Labuhan Deli. Data yang akan dianalisis berasal dari hasil wawancara langsung dengan bendahara Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, guna mengeksplorasi keterkaitan permasalahan yang diteliti.

Tabel 3. 3 Keterkaitan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
Indikator adalah sekumpulan proses yang diawali dengan proses pengumpulan data dan diakhiri dengan proses pencatatan, pengelompokan, serta ikhtisar kegiatan ataupun peristiwa finansial guna memperoleh laporan yang berfungsi untuk suatu tanggung jawab terhadap penyelenggaraan APBD.	Komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.
Sistem pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yakni: Single Entry, Double Entry dan Triplee Entry	Relevan, dapat diandalkan, komparatif, dan dimengerti adalah kualitas yang berkontribusi untuk memperoleh laporan keuangan berkualitas tinggi.
Sistem akuntansi keuangan daerah terbagi menjadi cash basis, cash to accrual basis, dan accrual basis sebagai tiga basis akuntansinya.	Laporan keuangan pada SKPD disajikan untuk dijadikan media terbuka, akuntabilitas, sebagai fasilitas informasi dan sebagai tempat evaluasi hasil kerja.

Berdasarkan tabel yang disajikan, penelitian ini berfokus pada penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang diperoleh sesuai dengan tabel akan dianalisis menggunakan metode analisis data melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pengorganisasian Data

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur, yakni proses tanya jawab dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Setelah sesi wawancara selesai, dilakukan transkripsi hasil wawancara dengan mendengarkan rekaman secara seksama untuk mencatat informasi secara rinci berdasarkan kata-kata yang diucapkan narasumber.

2. Penyederhanaan Data

Setelah data terorganisir, informasi yang tidak relevan atau tidak diperlukan akan disaring. Data yang telah disederhanakan ini kemudian diproses untuk tahapan berikutnya.

3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data. Selama wawancara, peneliti menganalisis jawaban responden. Jika jawaban yang diberikan belum sesuai dengan permasalahan penelitian, pertanyaan akan diulang atau diperjelas hingga data yang akurat dan valid diperoleh.

4. Hasil Interpretasi

Data yang telah melalui tahap pengorganisasian dan analisis akan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori yang relevan, meskipun hasil interpretasi ini dapat bersifat subjektif atau bias.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Labuhan Deli

Labuhan Deli dikenal sebagai tempat asal mula berdirinya Pelabuhan Belawan. Dahulu, kawasan ini merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Deli yang terkenal di wilayah Sumatera Timur. Bandar Labuhan Deli terletak di sepanjang aliran Sungai Deli. Kata “bandar” berasal dari istilah dalam bahasa Melayu Deli yang berarti pelabuhan atau tempat berlabuh. Karena saat itu wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Deli, maka pelabuhan tersebut diberi nama Labuhan Deli atau Bandar Deli.

Perkembangan pesat Bandar Labuhan Deli menarik perhatian para pendatang Eropa, yang kemudian memanfaatkan serta mengeksplorasi wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang datang adalah John Anderson, utusan Gubernur Penang, W.E. Philips, yang mengunjungi Labuhan Deli pada tahun 1823 sebagai bagian dari survei politik dan ekonomi di wilayah pesisir timur Sumatera demi kepentingan Inggris. Kemakmuran kawasan Deli juga menjadi daya tarik bagi para pendatang dari berbagai negara, termasuk masyarakat dari Tiongkok yang telah berkontribusi dalam meramaikan aktivitas di Labuhan Deli sejak pelabuhan itu mulai berdiri. Pada tahun 1903, para buruh kontrak asal Tiongkok tiba di Pelabuhan Belawan.

Dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan, Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara memerlukan perluasan wilayah untuk mendukung fungsinya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri.

Akibat dari perkembangan kota yang tidak dapat dihindari, pada tahun 1974 sejumlah besar desa di Kecamatan Labuhan Deli yang sebelumnya berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, resmi masuk ke dalam administrasi Kota Medan. Sejak saat itu, Kecamatan Labuhan Deli hanya mencakup empat desa, yaitu Desa Helvetia, Pematang Johar, Telaga Tujuh, dan Karang Gading. Kemudian, pada tahun 1995, Desa Helvetia mengalami pemekaran menjadi dua desa, yakni Desa Helvetia dan Desa Manunggal. Dengan demikian, sejak tahun 1995 hingga sekarang, Kecamatan Labuhan Deli terdiri atas lima desa: Desa Helvetia, Manunggal, Pematang Johar, Telaga Tujuh, dan Karang Gading.

Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Labuhan Deli tercatat sebanyak 68.299 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sebesar 85,12%. Selanjutnya, pemeluk agama Kristen mencapai 8,94%, yang terdiri atas 7,90% Protestan dan 1,04% Katolik. Sementara itu, penduduk yang menganut agama Buddha sebanyak 5,42%, dan penganut Hindu tercatat sebesar 0,52%.

Gambar 4. 1 Labuhan Deli Tahun 1890-an



Sumber: Wikipedia. 2025

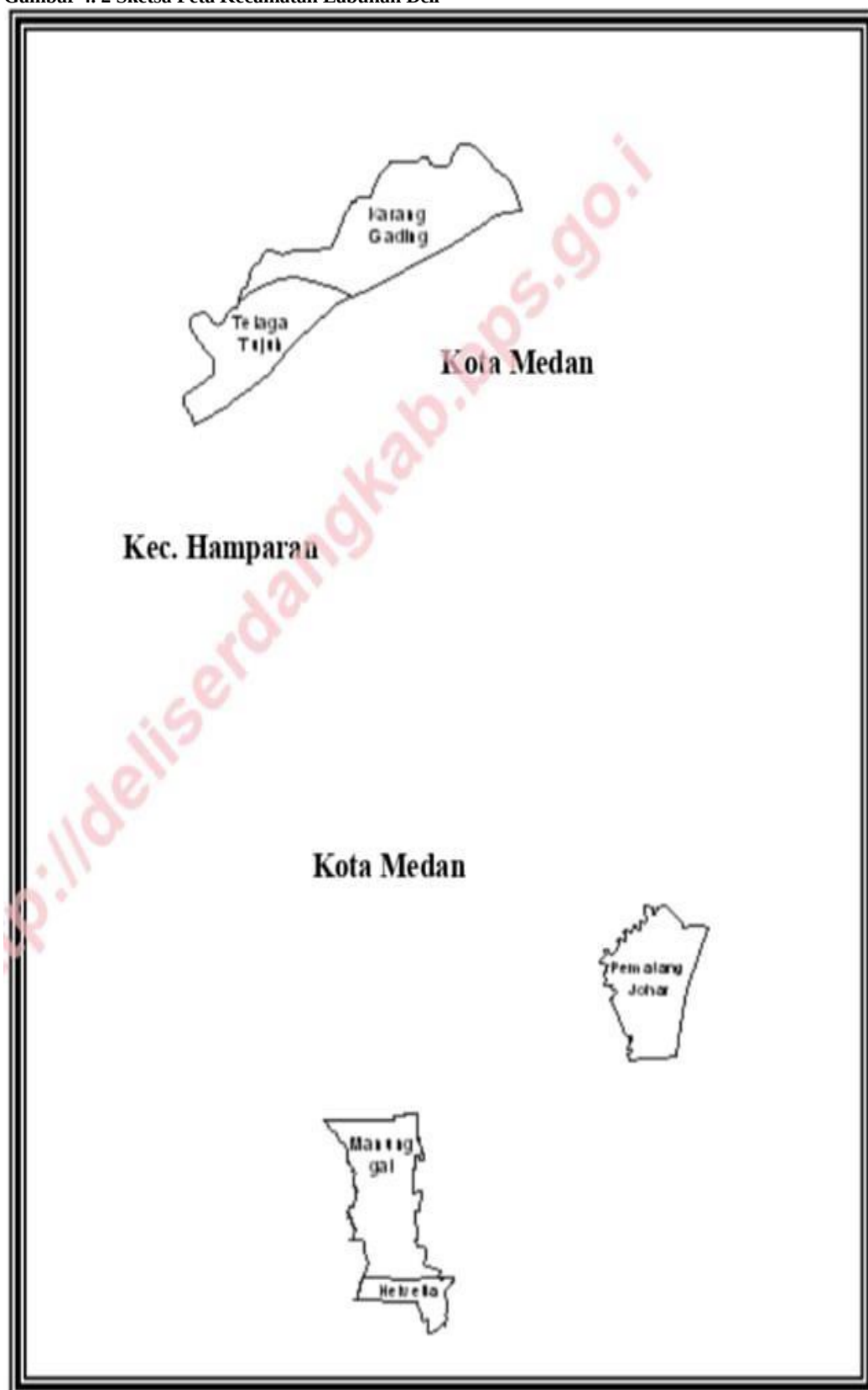
4.1.2 Letak Geografis

Secara geografis, Kecamatan Labuhan Deli terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan luas sekitar $\pm 127,23$ km². Kecamatan ini terdiri dari 5 desa dan 66 dusun, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Helvetia. Wilayah ini berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 5 meter di atas permukaan laut, terletak pada koordinat 03°37' Lintang Utara dan 98°47' Bujur Timur. Kecamatan Labuhan Deli beriklim tropis, memiliki dua musim utama yaitu musim hujan dan kemarau, serta suhu udara yang cenderung panas sepanjang tahun.

Kecamatan Labuhan Deli merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di Kota Medan, Kabupaten Langkat, serta kecamatan lain di Kabupaten Deli Serdang. Wilayah ini juga berfungsi sebagai daerah penyangga dalam mendukung kebutuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya, khususnya Kota Medan. Batas-batas administratif Kecamatan Labuhan Deli adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Langkat.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Medan dan Kecamatan Sunggal.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kota Medan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hamparan Perak.

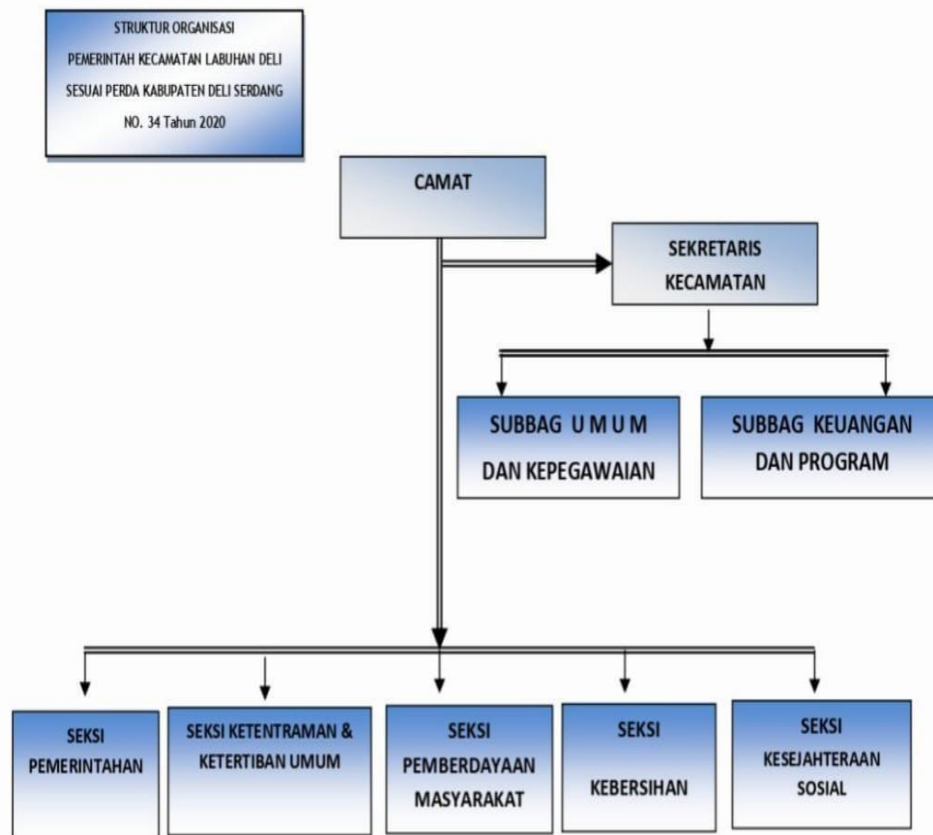
Gambar 4. 2 Sketsa Peta Kecamatan Labuhan Deli



Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2025

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Kecamatan Labuhan Deli



Sumber: Kantor Camat Labuhan Deli, 2025

4.1.3.1 Uraian Pekerjaan

1. **Camat**, bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Fungsi;

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan.
- b. Koordinasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- e. Pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan.
- f. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa/kelurahan.
- g. Pengelolaan administrasi kependudukan, keuangan, dan aset kecamatan.
- h. Penyusunan rencana pembangunan wilayah kecamatan.
- i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Bupati/Wali Kota.

2. **Sekretaris Kecamatan**, bertugas membantu Camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan kecamatan.

Fungsi;

- a. Perencanaan program dan kegiatan kecamatan, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kecamatan.
- b. Pengelolaan administrasi umum, seperti surat-menyurat, kearsipan, dan pelayanan tata usaha.
- c. Pengelolaan keuangan kecamatan, termasuk penyusunan laporan keuangan, pencairan dana, dan pertanggungjawaban anggaran.
- d. Pengelolaan kepegawaian dan urusan rumah tangga kantor, termasuk absensi, kenaikan pangkat, dan evaluasi kinerja pegawai.
- e. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi program kerja dan kegiatan kecamatan.

- f. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan administrasi kecamatan kepada Camat.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga kantor, serta perlengkapan dan dokumentasi di lingkungan kantor kecamatan.

Fungsinya;

- a. Pengelolaan administrasi umum, seperti surat menyurat, pengarsipan, dan pelayanan tata usaha kantor kecamatan.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi pencatatan data pegawai, absensi, cuti, kenaikan pangkat, mutasi, dan penilaian kinerja (SKP).
- c. Pengurusan kebutuhan rumah tangga kantor, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
- d. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan kantor, termasuk pengadaan dan pengawasan aset.
- e. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan kecamatan, seperti laporan kegiatan, foto dokumentasi, dan penyusunan laporan kinerja.
- f. Koordinasi dengan bagian kepegawaian di tingkat kabupaten/kota untuk urusan administrasi ASN.
- g. Menyusun laporan berkala dan insidental kepada Sekretaris Kecamatan.

- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai instruksi pimpinan dalam lingkup tugas dan fungsinya.

4. **Subbag Keuangan dan Program**, bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan, serta pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja di lingkungan Kecamatan.

Fungsinya;

- a. Menyusun rencana kerja tahunan kecamatan (Renja Kecamatan) berdasarkan kebijakan dan arahan dari Camat.
- b. Mengelola penyusunan anggaran kecamatan (RKA-SKPD), termasuk usulan belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan, seperti pengeluaran kas, pembukuan, pertanggungjawaban belanja, dan rekonsiliasi keuangan.
- d. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan rutin kecamatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengelola pelaporan dan evaluasi program/kegiatan, termasuk capaian indikator dan output program kecamatan.
- g. Melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- h. Menyusun laporan berkala dan insidental kepada Sekretaris Kecamatan dan instansi terkait lainnya.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup keuangan dan program.

5. **Seksi Pemerintahan**, bertugas melaksanakan tugas di bidang administrasi pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketenteraman dan ketertiban umum serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Fungsinya;

- a. Mengelola administrasi pemerintahan umum di tingkat kecamatan, termasuk tata pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan.
- b. Membina dan mengawasi pemerintahan desa/kelurahan dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pemilihan kepala desa/lurah.
- c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan dan catatan sipil bekerja sama dengan Dinas Dukcapil.
- d. Mengelola urusan pertanahan, termasuk fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan administrasi pendaftaran tanah.
- e. Membina ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa/kelurahan.
- h. Menyusun laporan kegiatan di bidang pemerintahan kepada Camat secara berkala.
- i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang pemerintahan.

6. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, bertugas melaksanakan tugas pembinaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan.

Fungsinya;

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan bekerja sama dengan aparat keamanan (TNI/Polri).
- b. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah bersama Satpol PP tingkat kabupaten/kota.
- c. Menangani aduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban seperti keributan, konflik sosial, atau pelanggaran lingkungan.
- d. Mengoordinasikan penanganan gangguan keamanan lingkungan, seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), penanganan bangunan liar, dan penertiban fasilitas umum.
- e. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan.
- f. Melaksanakan kegiatan patroli dan pemantauan wilayah, terutama pada area rawan gangguan trantibum.
- g. Mengelola administrasi kegiatan trantibum dan membuat laporan berkala kepada Camat.
- h. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya pencegahan konflik sosial.

- i. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

7. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**, bertugas melaksanakan kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan kapasitas masyarakat serta lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat di wilayah kecamatan.

Fungsinya;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- b. Membina dan mengembangkan kelembagaan masyarakat, seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan organisasi lokal lainnya.
- c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, termasuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).
- d. Memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, seperti kewirausahaan, pertanian, perikanan, keterampilan kerja, dan sejenisnya.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan.
- f. Mengelola data dan informasi potensi sumber daya masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta menyusun laporan kepada Camat secara berkala.

- h. Menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang pemberdayaan masyarakat.
8. **Seksi Kebersihan**, bertugas Melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan, penanganan sampah, serta pengawasan kebersihan fasilitas umum di wilayah kecamatan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Fungsinya;

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan secara berkala di seluruh wilayah kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) bekerja sama dengan dinas kebersihan/kebersihan kota.
- c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan petugas kebersihan di lapangan, termasuk penjadwalan dan rute pengangkutan.
- d. Membina kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, melalui sosialisasi, edukasi, dan program kerja bakti.
- e. Mengelola fasilitas pendukung kebersihan, seperti tong sampah, gerobak, dan alat pembersih jalan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan sampah dan melakukan tindakan preventif serta kuratif.
- g. Berkoordinasi dengan kelurahan/desa dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan secara berkala kepada Camat.
 - i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas kebersihan.
9. **Seksi Kesejahteraan Sosial**, bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pelayanan, dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Fungsinya;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- b. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap kelompok rentan sosial, seperti lansia, disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin.
- c. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat yang membutuhkan.
- d. Memfasilitasi kegiatan lembaga sosial masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan kelompok peduli sosial dalam mendukung program kesos.
- e. Mengelola data dan informasi kesejahteraan sosial serta melakukan evaluasi terhadap capaian program.
- f. Menangani dan merespon kasus-kasus sosial di masyarakat, termasuk bencana sosial, konflik keluarga, dan masalah kemiskinan.
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program kesos seperti PKH, BPNT, bantuan disabilitas, dan kegiatan sosial lainnya.

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG NERACA <i>Per 31 Desember 2024</i>		
Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Unit Organisasi : 4 . 11 . 02	KECAMATAN LABUHAN DELI	
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 02 . 01	KECAMATAN LABUHAN DELI	
URAIAN	2024	2023
ASET	1.664.365.440,00	1.928.286.146,00
ASET LANCAR	16.163.600,00	13.061.000,00
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana Desa	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00

Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	16.163.600,00	13.061.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
ASET TETAP	1.648.201.840,00	1.915.225.146,00
Tanah	480.000.000,00	480.000.000,00
Peralatan dan Mesin	2.447.073.667,00	2.445.073.667,00

URAIAN	2024	2023
Gedung dan Bangunan	1.552.263.394,00	1.552.263.394,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.831.135.221,00)	(2.562.111.915,00)
Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
DANA CADANGAN	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	399.300.000,00	399.300.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(399.300.000,00)	(399.300.000,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
KEWAJIBAN	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa	0,00	0,00
EKUITAS	1.664.365.440,00	1.928.286.146,00
EKUITAS	1.664.365.440,00	1.928.286.146,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.664.365.440,00	1.928.286.146,00



Sumber: Kantor Kecamatan Labuhan Deli, 2024

Neraca tahun 2024 Kantor Camat Labuhan Deli mencerminkan:

- a. Neraca menunjukkan kondisi keuangan yang bebas utang, namun nilai total aset menurun sekitar 13,68% dari tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi penyusutan.
- b. Tidak adanya saldo kas pada akhir tahun menandakan bahwa seluruh dana operasional kemungkinan telah direalisasikan untuk belanja dan aset.
- c. Peningkatan nilai persediaan menunjukkan adanya penambahan barang-barang untuk kegiatan operasional kantor.

2. Laporan Operasional (LO)

Tabel 4. 2 Laporan Operasional Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
Per 31 Desember 2024

Unit Organisasi : 7-01.2-11.2-13.02 Kecamatan Labuhan Deli					
Sub Unit Organisasi : 7-01.2-11.2-13.02.01 KECAMATAN LABUHAN DELI					
KODE	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN DAERAH-LO	163.970.000,00	135.780.000,00	28.190.000,00	20,76
08 . 01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	163.970.000,00	135.780.000,00	28.190.000,00	20,76
08 . 01 . 02	Retribusi Daerah-LO	163.970.000,00	135.780.000,00	28.190.000,00	20,76
09	BEBAN	4.589.093.092,00	4.221.424.921,00	367.668.171,00	8,71
09 . 01 . 00	Beban Pegawai	2.971.704.201,00	2.704.851.451,00	266.852.750,00	9,87
09 . 02 . 00	Beban Persediaan	146.679.200,00	180.413.300,00	(33.734.100,00)	(18,70)
09 . 03 . 00	Beban Jasa	1.090.853.385,00	969.464.951,00	129.388.434,00	13,35
09 . 04 . 00	Beban Pemeliharaan	87.051.000,00	105.796.000,00	(18.745.000,00)	(17,72)
09 . 05 . 00	Beban Perjalanan Dinas	15.782.000,00	23.368.000,00	(7.586.000,00)	(32,46)
09 . 06 . 00	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
09 . 07 . 00	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 . 08 . 00	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
09 . 09 . 00	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
09 . 10 . 00	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
09 . 11 . 00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	269.023.306,00	237.531.219,00	31.492.087,00	13,26
09 . 12 . 00	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
09 . 13 . 00	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(4.425.123.092,00)	(4.085.644.921,00)	(339.478.171,00)	8,31
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				

KODE	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
10.01.00	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.00	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.00	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.00	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.425.123.092,00)	(4.085.644.921,00)	(339.478.171,00)	8,31
	POS LUAR BIASA				
11.02.00	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.425.123.092,00)	(4.085.644.921,00)	(339.478.171,00)	8,31
					

Sumber: Kantor Kecamatan Labuhan Deli, 2024

Laporan Operasional Tahun 2024 mencerminkan:

- a. Peningkatan pendapatan PAD sebesar 20,76% menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja pemungutan retribusi daerah.
- b. Namun, beban operasional yang tinggi terutama beban pegawai dan jasa mengakibatkan defisit yang cukup besar.
- c. Beban penyusutan juga meningkat, sejalan dengan penambahan dan penggunaan aset tetap.
- d. Perlu strategi pengendalian beban operasional, khususnya di pos jasa dan pegawai, agar kinerja operasional lebih seimbang dengan capaian pendapatan.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Tabel 4. 3 Laporan Arus Kas Tahun 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 <i>Periode : 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024</i>		
URAIAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	730.951.349.100,30	506.265.901.956,24
ARUS MASUK KAS	4.329.368.290.683,57	3.852.247.290.024,33
Pajak Daerah	885.444.485.969,65	797.734.218.178,00
Retribusi Daerah	45.003.701.845,00	43.129.679.515,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.435.467.088,00	19.681.368.926,00
Lain-lain PAD yang Sah	217.750.513.306,92	188.174.445.905,33
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.909.911.686.357,00	2.547.684.285.288,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.822.436.117,00	255.843.292.212,00
ARUS KELUAR KAS	3.598.416.941.583,27	3.345.981.388.068,09
Belanja Pegawai	1.390.219.781.591,70	1.301.585.415.181,00
Belanja Barang dan Jasa	1.299.935.063.023,74	1.229.805.968.508,85
Belanja Hibah	290.833.301.663,83	229.918.082.680,24
Belanja Bantuan Sosial	80.250.000,00	114.260.000,00

Belanja Tidak Terduga	2.253.312.334,00	2.205.249.833,00
Belanja Bagi Hasil	84.041.435.170,00	79.586.056.365,00
Belanja Bantuan Keuangan	531.053.797.800,00	502.766.355.500,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	(670.875.641.536,92)	(518.101.226.445,00)
ARUS MASUK KAS	728.401.430,00	601.959.199,00
Lain-lain PAD yang Sah	728.401.430,00	601.959.199,00
ARUS KELUAR KAS	671.604.042.966,92	518.703.185.644,00
Belanja Modal Tanah	0,00	386.198.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.104.369.613,00	107.153.807.888,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.583.442.165,92	74.856.291.403,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	448.456.435.354,00	315.808.979.984,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.663.446.884,00	20.497.908.369,00
Belanja Modal Aset Lainnya	796.348.950,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / PEMBIAYAAN	0,00	26.180.162,76
ARUS MASUK KAS	0,00	26.180.162,76
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	26.180.162,76
ARUS KELUAR KAS	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / NON ANGGARAN	12.260.096.009,00	0,00
ARUS MASUK KAS	253.952.444.681,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	253.952.444.681,00	0,00
ARUS KELUAR KAS	241.692.348.672,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	241.692.348.672,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode	72.335.803.572,38	(11.809.144.326,00)
Saldo Awal Kas/SILPA	163.097.989.087,06	174.907.133.413,06
SALDO AKHIR	235.433.792.659,44	163.097.989.087,06
Terdiri dari :		

URAIAN	2024	2023
Kas dan Setara Kas	225.936.611.723,44	163.725.946.324,05
SILPA	225.936.611.723,44	163.725.946.324,05
SALDO AKHIR KAS	225.936.611.723,44	163.725.946.324,05



Sumber: Kantor Kecamatan Labuhan Deli, 2024

Arus Kas ini mencerminkan bahwa:

- a. Aktivitas operasi menjadi sumber utama penerimaan kas dengan tren peningkatan yang signifikan.
- b. Pengeluaran terbesar masih berasal dari belanja operasional, namun belanja modal juga cukup tinggi sehingga mengurangi kas melalui aktivitas investasi non-keuangan.
- c. Posisi akhir kas yang meningkat menunjukkan pengelolaan kas yang relatif baik pada 2024, meskipun masih ada arus keluar yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Tabel 4. 4 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 <i>Per 31 Desember 2024</i>		
Urusan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan : 4 . 11 . 02 Pemerintahan KECAMATAN LABUHAN Unit Organisasi : 4 . 11 . 02 . DELI Sub Unit 01 KECAMATAN LABUHAN DELI Organisasi		
URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.928.286.146,00	1.426.058.200,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.425.123.092,00)	(4.085.644.921,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	747.666.665,00

Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	747.666.665,00
Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	0,00	0,00
Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
Koreksi Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00
Koreksi Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi - TGR	0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi SDP (SAT/SPP)	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Utang Bunga	0,00	0,00
Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Piutang	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Panjang	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Transfer Keluar Kas	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Lainnya	0,00	0,00
Transfer Keluar Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan	0,00	0,00
Transfer Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Keluar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Transfer Keluar Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Transfer Keluar Aset Lain-lain	0,00	0,00
Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Transfer Keluar Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi -TGR	0,00	0,00
Transfer Keluar Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Transfer Keluar Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Transfer Masuk Kas	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Lainnya	0,00	0,00
Transfer Masuk Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Masuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Lain-lain	0,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Transfer Masuk Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi -TGR	0,00	0,00
Transfer Masuk Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Transfer Masuk Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BOS - LO	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BOS - LRA	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BOS - LO	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BOS - LRA	0,00	0,00
Transfer Keluar Lainnya	0,00	0,00
Transfer Masuk Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.161.202.386,00	3.840.206.202,00
EKUITAS AKHIR	1.664.365.440,00	1.928.286.146,00
		

Sumber: Kantor Kecamatan Labuhan Deli, 2024

Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan:

- a. Tren penurunan ekuitas pada 2024 terutama dipengaruhi oleh defisit operasional yang tinggi dan tidak adanya penyesuaian positif pada ekuitas.
- b. Peningkatan kewajiban untuk dikonsolidasikan juga menandakan adanya kewajiban potensial yang harus diperhitungkan dalam laporan konsolidasi keuangan pemerintah daerah.
- c. Secara keseluruhan, penurunan ekuitas ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran dan pengendalian beban operasional agar nilai kekayaan bersih tidak terus tergerus.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024

A. Informasi Umum

1. Entitas: Kantor Camat Labuhan Deli.
2. Periode pelaporan: 1 Januari 2024 — 31 Desember 2024.
3. Sumber data: Dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Deli Serdang: Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP/SAK Pemerintah) dengan pengakuan berbasis akrual untuk aset dan beban. Penyajian memisahkan aktivitas

operasi, investasi non-keuangan, pendanaan, serta aktivitas transitoris (PFK).

C. Ringkasan Pos-pos Utama (Angka kunci)

1. Total Aset (Neraca, 31 Des 2024): Rp1.664.365.440 (2023: Rp1.928.286.146)
2. Aset Lancar (Persediaan): Rp16.163.600 (2023: Rp13.061.000)
3. Aset Tetap (Neto): Rp1.648.201.840 (2023: Rp1.915.225.146), akumulasi penyusutan (Rp2.831.135.221)
4. Aset Lainnya (bruto): Rp399.300.000, nilai buku nol
5. Kewajiban di Neraca: 0
6. Ekuitas Akhir: Rp1.664.365.440 (2023: Rp1.928.286.146)
7. Pendapatan LO (PAD): Rp163.970.000 (2023: Rp135.780.000)
8. Total Beban LO: Rp4.589.093.092 (2023: Rp4.221.424.921)
9. Surplus/(Defisit) LO: (Rp4.425.123.092) (2023: (Rp4.085.644.921))
10. Arus Kas - Kenaikan Bersih: Rp72.335.803.572,38
11. Saldo Akhir Kas (Laporan Arus Kas): Rp235.433.792.659,44
12. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan (LPE): Rp4.161.202.386 (2023: Rp3.840.206.202)

D. Kebijakan Akuntansi Signifikan

1. Kas dan setara kas: diukur pada nilai nominal.
2. Persediaan: diukur pada biaya perolehan.
3. Aset tetap: diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan.

4. Pendapatan: PAD/transfer diakui saat hak atas penerimaan timbul.
5. Beban: diakui saat terjadinya.
6. Kewajiban: diakui apabila memenuhi definisi kewajiban kini.

E. Rincian dan Penjelasan Pos Utama

1. Kas dan Setara Kas Saldo awal SILPA: Rp163.097.989.087,06; Kenaikan bersih kas: Rp72.335.803.572,38; Saldo akhir: Rp235.433.792.659,44.
2. Persediaan Persediaan akhir 2024: Rp16.163.600 (naik dari Rp13.061.000).
3. Aset Tetap & Penyusutan Tanah Rp480.000.000; Peralatan & Mesin Rp2.447.073.667; Gedung & Bangunan Rp1.552.263.394; Akumulasi penyusutan (Rp2.831.135.221).
4. Aset Lainnya Bruto Rp399.300.000, nilai buku nol.
5. Kewajiban & Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Neraca: 0; LPE: Rp4.161.202.386.
6. Pendapatan & Beban Operasional Pendapatan PAD: Rp163.970.000; Beban terbesar: Pegawai Rp2.971.704.201; Jasa Rp1.098.853.385.
7. Arus Kas Operasi: Rp730.951.349.100,30; Investasi: (Rp670.875.641.536,92); Transitoris: Rp12.260.096.009.

F. Komitmen, Kontinjensi, dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

1. Komitmen belanja modal signifikan pada 2024.
2. Kontinjensi tidak diungkapkan dalam dokumen.

3. Tidak terdapat peristiwa material setelah tanggal pelaporan yang diungkapkan.

G. Rekonsiliasi & Pengungkapan Tambahan

Disarankan menambahkan tabel mutasi aset tetap, rincian belanja modal, rincian kewajiban untuk dikonsolidasikan, tabel rekonsiliasi kas, dan analisis rasio.

H. Kesimpulan & Rekomendasi

Posisi kas akhir 2024 meningkat, namun defisit LO besar akibat tingginya beban pegawai dan jasa. Rekomendasi:

1. rekonsiliasi lintas laporan,
2. pengungkapan kewajiban konsolidasi,
3. tabel mutasi aset tetap,
4. analisis pengendalian biaya, dan
5. verifikasi klasifikasi kas/SILPA.

4.2.2 Hasil Interview

1. NELA MAHFUZH NASUTION, S.SOS., M.AP.

Jabatan: Camat Labuhan Deli

Lokasi: Ruang Camat, Kantor Camat Labuhan Deli

Pertanyaan 1: *Bagaimana komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP) di Kantor Camat Labuhan Deli?* Jawaban: "Sebagai pimpinan, saya sangat berkomitmen penuh terhadap penerapan SAKP yang baik dan benar. Komitmen ini saya wujudkan dengan memberikan dukungan penuh kepada staf, baik dari segi kebijakan internal, alokasi anggaran untuk

pelatihan, maupun penyediaan sarana prasarana yang memadai. Saya juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan secara berkala, minimal setiap triwulan, untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan."

Pertanyaan 2: *Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi SAKP berbasis kas menuju akrual di tingkat kecamatan?*

Jawaban: "Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah keterbatasan SDM yang memahami akuntansi pemerintahan secara mendalam. Selain itu, sering terjadi perubahan regulasi yang harus kami ikuti, namun sosialisasi dari tingkat atas kadang terlambat atau kurang komprehensif. Masalah teknis seperti gangguan sistem SIPD RI juga menjadi kendala yang cukup mengganggu. Kami juga menghadapi keterbatasan anggaran untuk upgrading sistem dan pelatihan berkelanjutan bagi staf."

Pertanyaan 3: *Bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran?*

Jawaban: "Strategi utama kami adalah penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan internal dan eksternal. Kami juga menerapkan sistem pengawasan berjenjang, dimana setiap laporan harus melalui verifikasi berlapis sebelum difinalisasi. Selain itu, kami melakukan koordinasi intensif dengan Bagian Keuangan Kabupaten dan BPKP untuk mendapatkan *guidance* yang tepat. Kami juga menerapkan prinsip transparansi dengan mempublikasikan informasi keuangan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan website resmi."

Pertanyaan 4: *Sejauh mana penerapan SAKP telah berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Camat Labuhan Deli?*

Jawaban: "Penerapan SAKP telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Data keuangan kami menjadi lebih akurat dan mudah diaudit. Masyarakat juga dapat mengakses informasi keuangan dengan lebih mudah. Proses pengambilan keputusan anggaran menjadi lebih *evidence-based* karena didukung data yang *reliable*. Tingkat kepercayaan *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, juga meningkat karena laporan keuangan kami semakin kredibel."

Pertanyaan 5: *Apa rencana pengembangan dan perbaikan sistem akuntansi keuangan ke depan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi?*

Jawaban: "Rencana ke depan, kami akan fokus pada digitalisasi proses akuntansi yang lebih terintegrasi. Kami berencana mengusulkan pengadaan sistem yang lebih *user-friendly* dan stabil. Peningkatan SDM melalui sertifikasi profesi akuntansi pemerintahan juga menjadi prioritas. Kami juga akan memperkuat sistem pengendalian internal dan mengembangkan *dashboard monitoring* keuangan *real-time*. Koordinasi dengan instansi terkait juga akan kami intensifkan untuk memastikan konsistensi penerapan regulasi."

2. YUDHI ADITYA SITA, S.STP., M.SP.

Jabatan: Sekretaris Camat Labuhan Deli

Lokasi: Ruang Sekretaris Camat, Kantor Camat Labuhan Deli

Pertanyaan 1: *Bagaimana peran Sekretaris Camat dalam koordinasi penerapan SAKP di seluruh bagian/seksi di lingkungan Kantor Camat Labuhan Deli?*

Jawaban: "Sebagai Sekretaris Camat, saya berperan sebagai koordinator utama dalam implementasi SAKP. Saya memastikan semua bagian dan seksi memahami dan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin bulanan dan *briefing* khusus jika ada perubahan regulasi. Saya juga memfasilitasi komunikasi antara sub bagian keuangan dengan seksi-seksi operasional untuk memastikan sinkronisasi data dan informasi. Peran saya juga mencakup supervisi terhadap kualitas output yang dihasilkan setiap bagian."

Pertanyaan 2: *Bagaimana sistem koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas?*

Jawaban: "Kami memiliki sistem koordinasi berjenjang yang terstruktur. Setiap awal bulan, saya mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala sub bagian dan seksi untuk membahas target dan prioritas. Komunikasi harian dilakukan melalui WhatsApp group dan email resmi. Untuk proses penyusunan laporan keuangan, kami memiliki *timeline* yang jelas dengan *checkpoint* berkala. Setiap seksi wajib menyampaikan data pendukung tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sistem ini telah terbukti efektif dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaporan."

Pertanyaan 3: *Apa saja kendala operasional yang sering dihadapi dalam proses implementasi SAKP dan bagaimana solusi yang diterapkan?*

Jawaban: "Kendala utama adalah ketergantungan pada dua sistem aplikasi (SIPD Deli Serdang dan SIPD RI) yang memerlukan input data ganda. Hal ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Solusi yang kami terapkan adalah membuat *checklist* verifikasi data dan menugaskan staf khusus untuk memastikan sinkronisasi kedua sistem. Kendala lain adalah jadwal pelaporan yang ketat dari berbagai instansi. Kami mengatasi ini dengan membuat *master schedule* terintegrasi dan sistem *early warning* jika ada *deadline* yang mendekat."

Pertanyaan 4: *Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan konsistensi dan akurasi data keuangan dari berbagai sumber di lingkungan kecamatan?*

Jawaban: "Kami menerapkan sistem validasi berlapis untuk memastikan konsistensi data. Pertama, validasi di tingkat input oleh operator. Kedua, verifikasi oleh Kepala Sub Bagian Keuangan. Ketiga, review oleh saya sebagai Sekretaris sebelum diserahkan ke Camat. Kami juga membuat rekonsiliasi rutin antara data fisik dan sistem, serta melakukan cross-check dengan dokumen pendukung. Untuk memastikan akurasi, kami menerapkan *four-eyes principle* dimana setiap transaksi harus diverifikasi minimal oleh dua orang yang berbeda."

Pertanyaan 5: *Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan terhadap efektivitas penerapan SAKP di Kantor Camat Labuhan Deli?*

Jawaban: "Evaluasi kami lakukan secara berkala melalui beberapa metode. Pertama, monitoring harian melalui *dashboard* sederhana yang menampilkan progress input data dan realisasi anggaran. Kedua, evaluasi bulanan dalam rapat koordinasi untuk mengidentifikasi masalah dan solusi. Ketiga, evaluasi triwulanan yang melibatkan seluruh staf untuk *assessment* menyeluruh. Kami juga melakukan *benchmarking* dengan kecamatan lain yang memiliki kinerja baik. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan SOP dan peningkatan kapasitas staf. *Feedback* dari auditor eksternal juga kami jadikan masukan berharga untuk perbaikan sistem."

3. LIKA ISMAYSIKTAH, S.IP.

Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Lokasi: Ruang Sub Bagian Keuangan, Kantor Camat Labuhan Deli

Pertanyaan 1: *Bagaimana proses implementasi SAP berbasis kas menuju akrual dalam praktik sehari-hari di Sub Bagian Keuangan?*

Jawaban: "Implementasi SAP berbasis kas menuju akrual kami lakukan dengan membagi proses menjadi dua tahap. Untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, kami menggunakan basis kas sesuai dengan aliran kas yang terjadi. Sedangkan untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas, kami menggunakan basis akrual yang mengakui transaksi saat terjadi terlepas dari aliran kasnya. Dalam praktik harian, kami menggunakan jurnal standar yang telah disesuaikan dengan ketentuan SAP. Setiap transaksi dicatat secara *real-time* dan dilakukan rekonsiliasi harian untuk memastikan akurasi data."

Pertanyaan 2: *Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD (Deli Serdang dan SIPD RI) dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelaporan?*

Jawaban: "Hambatan utama adalah ketidakstabilan sistem SIPD RI yang sering mengalami *downtime*, terutama menjelang *deadline* pelaporan. Hal ini memaksa kami bekerja lembur dan terkadang menunda penyampaian laporan. Perbedaan *interface* dan logika antara SIPD Deli Serdang dan SIPD RI juga menyulitkan karena harus melakukan input ulang data dengan format yang berbeda. Dampaknya terhadap kualitas pelaporan cukup signifikan, karena proses input ulang berpotensi menimbulkan *human error* dan inkonsistensi data. Kami mengatasi ini dengan membuat format *bridge* dan melakukan *double check* setiap kali transfer data."

Pertanyaan 3: *Bagaimana proses penyusunan komponen laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) dan kendala yang dihadapi?*

Jawaban: "Proses penyusunan dimulai dari LRA sebagai basis utama karena menggunakan data kas yang paling akurat. Neraca disusun dengan menggabungkan data dari sistem aset, utang, dan ekuitas yang terintegrasi. Laporan Operasional memerlukan adjustment dari basis kas ke akrual, terutama untuk pengakuan beban penyusutan. LAK kami susun berdasarkan pengelompokan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. LPE relatif sederhana karena mengikuti perubahan yang sudah terekam di sistem. Kendala terbesar adalah penyusunan CaLK yang memerlukan

penjelasan detail dan analisis mendalam, sementara waktu penyusunan terbatas."

Pertanyaan 4: *Bagaimana upaya peningkatan kompetensi SDM di bidang akuntansi pemerintahan dan dampaknya terhadap kinerja Sub Bagian Keuangan?*

Jawaban: "Kami secara aktif mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kemendagri, BPKP, dan BPK. Selain itu, kami juga mengadakan *sharing session internal* setiap kali ada staf yang mengikuti pelatihan eksternal. Saya pribadi juga mengikuti webinar dan *workshop* akuntansi pemerintahan untuk *update knowledge* terbaru. Dampaknya sangat positif, tingkat *error* dalam penyusunan laporan berkurang signifikan, dan waktu penyelesaian laporan menjadi lebih efisien. Pemahaman staf terhadap logika akuntansi juga meningkat, sehingga dapat melakukan *troubleshooting* mandiri jika ada masalah."

Pertanyaan 5: *Bagaimana penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan saat ini dan rencana perbaikan ke depan?*

Jawaban: "Secara umum, kualitas laporan keuangan kami sudah cukup baik dan memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai SAP. Tingkat akurasi data sudah tinggi dan konsisten antar periode. Namun, masih ada ruang perbaikan terutama dalam aspek ketepatan waktu dan kelengkapan analisis dalam CaLK. Rencana perbaikan ke depan meliputi implementasi sistem *early warning* untuk *deadline*, peningkatan *template* analisis keuangan, dan pengembangan *dashboard monitoring real-time*. Kami juga berencana mengusulkan

pelatihan lanjutan untuk sertifikasi profesi akuntansi pemerintahan bagi seluruh staf keuangan."

4. BIDASARI

Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Lokasi: Ruang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kantor Camat Labuhan Deli

Pertanyaan 1: *Bagaimana peran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam mendukung implementasi SAKP, khususnya dalam hal pengelolaan aset dan inventaris?*

Jawaban: "Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam pengelolaan aset dan inventaris yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan seluruh aset tetap kantor. Setiap pengadaan barang, kami pastikan didokumentasikan dengan lengkap dan segera diinformasikan ke Sub Bagian Keuangan untuk pencatatan akuntansi. Kami juga melakukan *stock opname* rutin setiap semester dan inventarisasi tahunan untuk memastikan kesesuaian antara aset fisik dengan catatan akuntansi. Koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan sangat intensif, terutama untuk perhitungan penyusutan dan penilaian aset."

Pertanyaan 2: *Bagaimana sistem pengelolaan dokumen dan arsip keuangan untuk mendukung akuntabilitas dan audit?*

Jawaban: "Kami menerapkan sistem filing yang terstruktur dan terstandarisasi untuk semua dokumen keuangan. Setiap dokumen diberi kode klasifikasi dan disimpan secara kronologis dalam *filing cabinet*

khusus. Untuk dokumen penting, kami buat *backup* dalam bentuk digital dan disimpan di *server* yang aman. Sistem *retrieval* kami rancang untuk memudahkan pencarian dokumen saat dibutuhkan untuk audit atau keperluan lain. Kami juga memiliki *logbook* keluar masuk dokumen untuk tracking yang lebih baik. Retensi dokumen dilakukan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku."

Pertanyaan 3: *Apa saja kendala dalam pengelolaan kepegawaian yang berkaitan dengan implementasi SAKP dan bagaimana solusinya?*

Jawaban: "Kendala utama adalah keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Dari total pegawai yang ada, hanya sebagian kecil yang benar-benar memahami akuntansi pemerintahan. Hal ini membuat beban kerja Sub Bagian Keuangan menjadi sangat tinggi. Solusi yang kami terapkan adalah *cross training*, dimana pegawai dari bagian lain diberikan pelatihan dasar akuntansi untuk membantu jika diperlukan. Kami juga mengusulkan formasi khusus untuk tenaga akuntansi dalam setiap rekrutmen CPNS atau PPPK. Untuk jangka pendek, kami mengoptimalkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan di bidang keuangan."

Pertanyaan 4: *Bagaimana upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan dalam mendukung penerapan SAKP?*

Jawaban: "Kami memiliki program peningkatan kapasitas yang sistematis. Pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan *gap analysis* kompetensi *existing staff*. Kedua, penyusunan rencana pelatihan tahunan yang disesuaikan dengan anggaran dan prioritas. Ketiga, pelaksanaan

pelatihan baik internal maupun eksternal. Pelatihan internal kami lakukan melalui *mentoring* dan *coaching* oleh *senior staff*. Pelatihan eksternal meliputi bimtek SAP, *workshop* akuntansi pemerintahan, dan seminar update regulasi. Kami juga mendorong staf untuk mengikuti pendidikan formal yang relevan dengan tugas dan fungsinya. *Follow up* pasca pelatihan dilakukan melalui *sharing session* dan evaluasi penerapan."

Pertanyaan 5: *Bagaimana koordinasi Sub Bagian Umum dengan Sub Bagian Keuangan dalam memastikan kelengkapan data pendukung laporan keuangan?*

Jawaban: "Koordinasi kami lakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kami memiliki jadwal rutin penyampaian data dari Sub Bagian Umum ke Sub Bagian Keuangan, terutama data yang berkaitan dengan aset, inventaris, dan kepegawaian. Setiap akhir bulan, kami serahkan laporan mutasi aset, daftar hadir pegawai, dan dokumen pendukung lainnya. Komunikasi harian dilakukan melalui sistem informal untuk hal-hal yang bersifat urgent. Kami juga terlibat dalam proses verifikasi data sebelum laporan keuangan difinalisasi. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data, terutama untuk pos-pos yang terkait dengan pengelolaan umum dan kepegawaian."

5. PARAMITHA F LUBIS, S.SOS.

Jabatan: Kepala Seksi Pemerintahan

Lokasi: Ruang Seksi Pemerintahan, Kantor Camat Labuhan Deli

Pertanyaan 1: *Bagaimana Seksi Pemerintahan berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat?*

Jawaban: "Seksi Pemerintahan berperan penting dalam menyediakan data dasar yang menjadi landasan penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Kami menyediakan data kependudukan, administrasi desa, dan program-program pemerintahan yang menjadi basis perencanaan kegiatan. Data ini meliputi jumlah penduduk per desa, tingkat kemiskinan, dan kebutuhan pelayanan *public* yang mempengaruhi alokasi anggaran. Kami juga menyampaikan laporan realisasi kegiatan secara berkala ke Sub Bagian Keuangan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Koordinasi rutin kami lakukan untuk memastikan data yang kami berikan akurat dan *up to date*."

Pertanyaan 2: *Bagaimana proses koordinasi antara Seksi Pemerintahan dengan Sub Bagian Keuangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan?*

Jawaban: "Koordinasi dimulai dari tahap perencanaan dimana kami menyampaikan usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Sub Bagian Keuangan kemudian mentranslasikan usulan tersebut ke dalam format anggaran sesuai kaidah penganggaran. Selama pelaksanaan, kami berkoordinasi intensif terkait jadwal pelaksanaan,

perubahan *scope* jika diperlukan, dan pelaporan progress. Setiap kegiatan yang kami laksanakan harus dilaporkan ke Sub Bagian Keuangan dengan dokumen pendukung yang lengkap untuk keperluan pertanggungjawaban. Kami juga terlibat dalam proses evaluasi kinerja dan realisasi anggaran di akhir tahun."

Pertanyaan 3: *Apa saja tantangan dalam menyediakan data operasional yang diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan?*

Jawaban: "Tantangan utama adalah memastikan akurasi dan keterkinian data di tengah dinamika yang tinggi di lapangan. Data kependudukan misalnya, sering berubah karena mobilitas penduduk yang tinggi. Keterbatasan SDM juga menjadi kendala dalam melakukan updating data secara *real-time*. Selain itu, koordinasi dengan 5 desa di wilayah kecamatan tidak selalu berjalan lancar karena perbedaan pemahaman dan kemampuan aparatur desa. Kami juga menghadapi keterbatasan sarana prasarana IT untuk digitalisasi data. Solusi yang kami terapkan adalah membuat sistem pelaporan berjenjang, pelatihan rutin untuk aparatur desa, dan optimalisasi teknologi yang ada."

Pertanyaan 4: *Bagaimana upaya Seksi Pemerintahan dalam memastikan kesesuaian antara program yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dalam laporan keuangan?*

Jawaban: "Kami menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kesesuaian tersebut. Di tahap perencanaan, kami buat detail program dengan target dan indikator yang jelas. Selama

pelaksanaan, dilakukan monitoring berkala dengan dokumentasi yang lengkap. Setiap perubahan atau penyesuaian harus melalui prosedur formal dan dilaporkan ke Sub Bagian Keuangan. Di akhir kegiatan, kami buat laporan komprehensif yang memuat realisasi fisik dan keuangan. *Cross check* dilakukan antara laporan kami dengan catatan keuangan untuk memastikan tidak ada *discrepancy*. Sistem ini membantu menjaga integritas data dan mendukung akuntabilitas laporan keuangan."

Pertanyaan 5: *Bagaimana penilaian terhadap efektivitas sistem pelaporan keuangan saat ini dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat operasional?*

Jawaban: "Sistem pelaporan keuangan saat ini sudah cukup efektif dalam menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan operasional. Laporan realisasi anggaran yang rutin kami terima membantu dalam perencanaan dan penyesuaian program. Data yang tersaji juga cukup detail dan mudah dipahami. Namun, masih ada ruang perbaikan terutama dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan dan kedalaman analisis. Kami berharap ke depan bisa ada sistem dashboard yang menampilkan data real-time sehingga pengambilan keputusan bisa lebih responsif. Integrasi sistem antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan juga perlu diperkuat agar sinkronisasi data lebih optimal. Secara umum, sistem saat ini sudah mendukung transparansi dan akuntabilitas yang kami butuhkan."

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Labuhan Deli

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan tahun 2024, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP) di Kantor Camat Labuhan Deli telah berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian laporan keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Permasalahan dalam perubahan sistem yang terjadi menyulitkan bendahara untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang berlangsung cukup sering dalam waktu singkat dan mengakibatkan gagal input. Selain itu, adanya regulasi yang seperti adanya pemotongan dalam suatu kebijakan kerap kali hanya diumumkan melalui situs web Pemerintahan Kabupaten.

Dilihat dari Laporan Anggaran dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan menitikberatkan pada PP No. 71 Tahun 2010 yang meliputi pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas.

Hasil penelitian yang terjadi melalui wawancara terkait PP No. 71 Tahun 2010 yang dimana berbasis akrual. Hal ini terungkap pada hasil wawancara melalui ibu kasubbag keuangan yang menerapkan LRA, NERACA, LO, LAK, LPE, CaLK. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 yang sudah diakui secara akrual dan tertuang dalam Tabel 4.2 dimana pendapatan anggaran di akui di LO sebesar 163.970.000,00.

Berdasarkan penelitian diatas didapatkan oleh penelitian Jukharia Ritonga (2023) yang meneliti tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan PP No.71 Tahun 2010. Dampak dari penerapan SAP adalah kesesuaian antara LRA dengan regulasi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 tentang meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Secara umum, penerapan SAKP telah membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang lengkap, relevan, dan sesuai format SAP. Namun, kualitas dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan rekonsiliasi kewajiban, pengendalian beban, dan pengungkapan lebih detail pada CaLK.

4.3.2 Laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli telah disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Dengan perbaikan pada dua poin tersebut, laporan keuangan akan lebih sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap SAP dan PP No. 71 Tahun 2010.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya:

(Ningsih, 2013) dan (Ma'ruf, 2020) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah di beberapa kantor camat masih belum sepenuhnya sesuai SAP dan PP terkait. Dibandingkan penelitian tersebut, Kantor Camat Labuhan Deli menunjukkan kemajuan karena telah menyajikan laporan

sesuai format SAP, meskipun masih ada kelemahan pada rekonsiliasi kewajiban dan pengungkapan detail.

(Ritonga, 2023) menyatakan penerapan SAKP di Kantor Camat Sunggal cukup baik dan berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan, di mana Kantor Camat Labuhan Deli juga sudah menerapkan SAKP dengan cukup baik, meski masih memerlukan peningkatan pada aspek pengungkapan dan rekonsiliasi data.

(Zoraya et al., 2024) menemukan Kantor Kecamatan Mamajang hanya menyajikan lima komponen laporan dari tujuh yang diwajibkan SAP. Kantor Camat Labuhan Deli telah menyajikan laporan lebih lengkap, sehingga lebih sesuai dengan ketentuan PP No. 71 Tahun 2010.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan bahwa penerapan SAKP yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun tetap diperlukan pengendalian internal dan pengungkapan yang memadai agar informasi yang dihasilkan benar-benar andal dan bermanfaat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kantor Camat Labuhan Deli telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Hal ini ditunjukkan melalui penyusunan laporan keuangan yang mencakup LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta CaLK. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan berbasis akrual, dengan sistem informasi yang terintegrasi melalui SIPD.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi unsur-unsur kualitas pelaporan, seperti relevansi, keandalan, dan kemudahan pemahaman. Hal ini memberikan dukungan bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di lingkungan Kantor Camat Labuhan Deli.
3. Secara umum, laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PP No. 71 Tahun 2010, baik dari segi struktur, basis pencatatan, maupun prinsip penyajiannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan bimtek serta ketidakterpaduan antara SIPD pusat dan daerah yang masih menjadi tantangan.
4. Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan SAP secara tepat dapat meningkatkan kualitas

laporan keuangan pemerintah, bahkan di unit kerja pemerintahan yang berada pada level operasional seperti kecamatan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melalui BPKAD, disarankan untuk meningkatkan frekuensi pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan agar pemahaman terhadap SAP dan pelaporan berbasis akrual semakin optimal.
2. Perlu dilakukan penguatan sistem integrasi SIPD, baik secara teknis maupun prosedural, untuk memastikan sinkronisasi data antara kecamatan dan kabupaten, serta antara sistem SIPD lokal dan SIPD nasional.
3. Kantor Camat Labuhan Deli diharapkan dapat terus melakukan evaluasi internal terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun setiap tahun, termasuk memperhatikan aspek dokumentasi dan ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara lebih lengkap.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh SAP terhadap pengambilan keputusan anggaran, serta efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanegara, H. M. S., SE, A., & MM, C. A. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2022). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik edisi 2*.
- Indonesia, P. R. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Ma'ruf, A. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Riau.
- Masnita, N., Mayasari, R., Firmansyah, F., Febriantoko, J., & Said, J. (2021). The effect of good government governance on the financial reports quality: The case of provincial capital governments in Indonesia. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), 270–287.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi, Edisi 4*. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=f4ncEAAAQBAJ>
- Mulyadi, M. (2013). *Sistem Akuntansi, Edisi Tiga, Cetakan Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Napitupulu, P. (2017). *Pelayanan publik & customer satisfaction*.
- Negeri, K. D. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Ningsih, F. (2013). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Peraturan Perundang-undangan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ritonga, J. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)*. North Sumatra State Islamic University, Medan.
- Safitri, A., Heriyanto, M., & Ibrahim, M. (2017). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 226–236.
- Strong, C. F. (2024). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*.
- Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia (BAKI)*, 5(1), 1–13.
- Susanti, H. K. (2020). *Akuntansi Pemerintah*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso., D. E. (2015). *Financial Accounting IFRS Edition*. Third edition. In *Financial Accounting*.
- Zoraya, G. D., Abubakar, H., & Faridah, F. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Di Kantor Camat Mamajang Kota Makassar. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(2), 91–98.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 311 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/12/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 04/12/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mita Nur Aulia
NPM : 2005170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Kualitas laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak transparan, 2. Penerapan sistem akuntansi yang belum optimal, 3. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan standar
- Rencana Judul : 1. Pengaruh penerapan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan
2. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal
3. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan efektivitas pengendalian internal

Objek/Lokasi Penelitian: Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Mita Nur Aulia)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 311/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/12/2024

Nama Mahasiswa : Mita Nur Aulia
NPM : 2005170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 04/12/2024
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si (04 Januari 2025)

Judul Disetujui^{**)}

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KANTOR
CAMAT LABUHAN DELI

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 10-2-2025

Dosen Pembimbing

Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1442/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 4 Desember 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Mita Nur Aulia
N P M : 2005170085
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli

Dosen Pembimbing : **Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si**

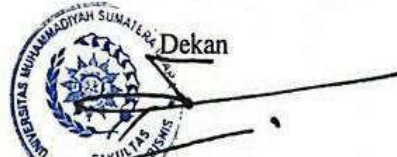
Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **30 April 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Dzulqaidah 1446 H
30 April 2025 M




Dr. H. Hanur, S.E., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

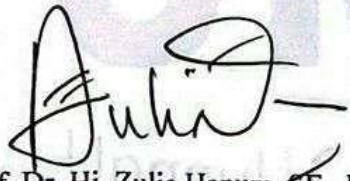
Tembusan :
1. Pertiinggal

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Mita Nur Aulia
NPM : 2005170085
Dosen Pembimbing : Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	perbaiki latar belakang masalah identifikasi masalah, rumusan masalah	11 Juni 2025	
Bab 2	perbaiki daftar teori dan kerangka konseptual	11 Juni 2025	
Bab 3	defenisi operasional, teknik analisis data,	11 Juni 2025	
Daftar Pustaka	perbaiki daftar pustaka, buat mendeley	11 Juni 2025	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Cek kembali data penelitian	11 Juni 2025	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan	11 Juni 2025	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 11 Juni 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 02 Juli 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Mita Nur Aulia*
NPM. : 2005170085
Tempat / Tgl.Lahir : 09 Januari 2002
Alamat Rumah : Jln. Serbaguna GG. Beringin psr.4 Helvetia
Judul Proposal : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT LABUHAN DELI
Bab I	Isi bab I
Bab II	Isi bab II
Bab III	Isi bab III
Lainnya	
Kesimpulan	☒ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, 02 Juli 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si

Pembanding

Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 02 Juli 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Mita Nur Aulia
NPM : 2005170085
Tempat / Tgl.Lahir : 09 Januari 2002
Alamat Rumah : Jln. Serbaguna GG. Beringin psr.4 Helvetia
Judul Proposal : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si*

Medan, 02 Juli 2025

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Ni. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris



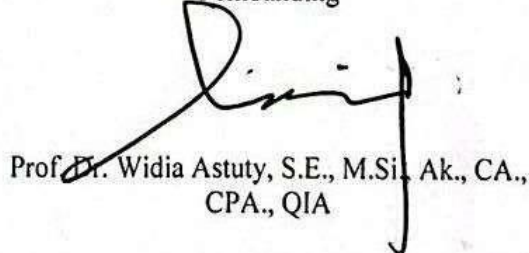
Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.Si

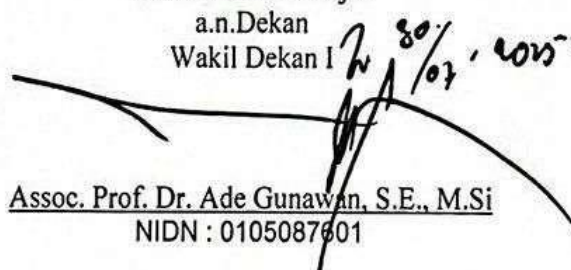
Pembanding



Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., QIA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I



28/07/2025

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mita Nur Aulia
NPM : 2005170085
Konsentrasi : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Sektor Publik)
Judul : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli.

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, ~~23~~ Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Mita Nur Aulia

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya siapa saja agar mendapatkan
reputasi dan pengakuan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/KBAN-PT/Ak.Pj/PT18/2024

Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Satri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 1442/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 01 Dzulqaidah 1446 H
30 April 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Kecamatan Labuhan Deli
Jln. Veteran No. 21 Tj.Gusta Sunggal
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Mita Nur Aulia
Npm : 2005170085
Program Studi : Akuntansi
Semester : X (Sepuluh)
Judul Tugas Akhir : Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertiinggal





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN LABUHAN DELI

Jl. Veteran No. 21 Helvetia Kode Pos : 20373

Telp. (061) 8446793

Email : kec.labuhandeli@gmail.com

Labuhan Deli, 30 April 2025

Nomor : 400.3/612
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1442/II.3-AU/UMSU-
05/F/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Izin Riset Pendahuluan.

Menindaklanjuti hal tersebut dengan ini Camat Labuhan Deli Kabupaten
Deli Serdang memberi izin kepada Mahasiswi sebagai berikut:

Nama : Mita Nur Aulia
NPM : 200517085
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli

untuk dapat melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data di Kantor
Camat Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

CAMAT LABUHAN DELI,



NEK MAHFUDAH NASUTION. S.Sos, M.AP
NIP. 19731112 199303 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN LABUHAN DELI

Jl. Veteran No. 21 Helvetia Kode Pos : 20373

Telp. (061) 8446793

Email : kec.labuhandeli@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor. 800 / 804

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nela Mahfuzah Nasution, S.Sos., M.AP
NIP : 19731112 199303 2 005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/B)
Jabatan : Camat Labuhan Deli

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mita Nur Aulia
NPM : 200517085
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

telah melaksanakan riset pada tanggal 03 Juli – 02 Agustus 2025 di Kantor Camat Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Deli, 03 Agustus 2025



NELA MAHFUZH NASUTION, S.Sos, M.AP
NIP. 19731112 199303 2 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mita Nur Aulia
NPM : 2005170085
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 09 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Serbaguna Gg. Beringin Psr IV Helvetia
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara
Email : mitanuraulia2001@gmail.com
No Hp/ WA : 0813-7741-1505

Nama Orang Tua

Ayah : Hamzah, S.Sos
Pekerjaan : PNS
Ibu : Endang Anita, S.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Serbaguna Gg. Beringin Psr IV Helvetia
No. Telepon : 0813-7741-1505

Pendidikan Formal

1. SD Pangeran Antasari Tamat Tahun 2014
2. SMP Negeri 1 Labuhan Deli Tamat Tahun 2017
3. SMA Negeri 1 Labuhan Deli Tamat Tahun 2020
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 s/d Sekarang